

**ANALISIS PENGARUH BELANJA MODAL PEMERINTAH DAERAH ,TENAGA KERJA  
TERSERAP DAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA TERHADAP PERTUMBUHAN  
EKONOMI DAN KEMISKINAN  
(Studi kasus 35 kabupaten / kota di Provinsi Jawa Tengah)**

**Santi Nurmainah**

Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang  
Jl. Prof Sudharto, SH Tembalang Semarang 50275  
[santi.kcil@yahoo.co.id](mailto:santi.kcil@yahoo.co.id)

**ABSTRACT**

*The aims of this study are to examine the effect of capital expenditures of local governments, labor absorption and the Human Development Index on economic growth and poverty in 35 districts / cities in Central Java Province. This study uses secondary data. There are variable capital expenditures of local governments, labor absorption and the Human Development Index as an exogenous variable, while economic growth and poverty level as an endogenous variable. This study uses panel data which combines time series data and cross section. These data were analyzed using Structural Equation Modeling with AMOS 20 program. The results showed that the four proposed hypothesis are accepted and the hypothesis is rejected. Hypothesis 1 suggests that the local government capital expenditure significantly positive effect on economic growth. Hypothesis 2 suggests that the labor absorption significantly positive effect on economic growth. Hypothesis 3 suggests that the Human Development Index significantly positive effect on economic growth. Hypothesis 4 suggests that economic growth no significant effect on poverty. Hypothesis 5 suggests that the Human Development Index is significantly negative effect on poverty*

**Keywords:** Capital expenditures of local governments, labor absorption, Human Development Index, economic growth, poverty, structural equation model (SEM)

**ABSTRAK**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh belanja modal dari pemerintah daerah, penyerapan tenaga kerja dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di 35 kabupaten / kota di Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan data sekunder. Ada belanja modal variabel pemerintah daerah, penyerapan tenaga kerja dan Indeks Pembangunan Manusia sebagai variabel eksogen, sementara pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan sebagai variabel endogen. Penelitian ini menggunakan data panel yang menggabungkan data time series dan cross section. Data ini dianalisis dengan menggunakan Structural Equation Modeling dengan AMOS 20 Program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keempat hipotesis yang diajukan diterima dan hipotesis ditolak. Hipotesis 1 menyatakan bahwa belanja modal pemerintah daerah berpengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hipotesis 2 menyatakan bahwa penyerapan tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hipotesis 3 menyatakan bahwa Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hipotesis 4 menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Hipotesis 5 menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia adalah efek signifikan negatif terhadap kemiskinan

**Kata kunci:** belanja modal pemerintah daerah, daya serap tenaga kerja, indeks pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, model persamaan struktural (sem)

**PENDAHULUAN**

Menurut Kuznets dalam Todaro (2003) pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 5,76 persen dan berada di bawah pertumbuhan ekonomi nasional dengan rata-rata sebesar 5,82 persen. Selain itu ,Provinsi Jawa Tengah juga

merupakan provinsi dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi paling rendah kedua setelah Yogyakarta dari enam provinsi yang berada di Pulau Jawa selama periode 2007-2012.

(Kuncoro:2003)pertumbuhan ekonomi penting untuk mempertahankan kesejahteraan rakyatnya, namun kenyataannya Provinsi Jawa Tengah termasuk provinsi peringkat pertama dari enam provinsi di Pulau Jawa yang memiliki persentase penduduk

tahun 2010 dan 2011 mengalami penurunan lebih rendah dari DI Yogyakarta.

Todaro (2003) mengemukakan ada tiga komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi dari setiap negara. *Pertama*, akumulasi modal, yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik dan modal manusia atau sumberdaya manusia. *Kedua*, pertumbuhan penduduk yang selanjutnya akan menambah jumlah angkatan kerja. *Ketiga*, kemajuan teknologi yaitu berupa cara-cara baru atau perbaikan atas cara-cara lama dalam menangani suatu pekerjaan.

Todaro (2003) menyampaikan bahwa akumulasi modal terjadi apabila sebagian dari pendapatan ditabung dan diinvestasikan kembali dengan tujuan memperbesar output dan pendapatan dikemudian hari. Menurut Sasana (2006) investasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah dengan mengalokasikan dana untuk berbagai proyek pembangunan untuk membangun sarana dan prasarana umum. Investasi pemerintah daerah tersebut dirinci dalam belanja modal pemerintah daerah. Pada kenyataannya, realisasi belanja modal memiliki porsi yang lebih sedikit dibandingkan dengan belanja pegawainya padahal belanja modal merupakan bagian dari rincian belanja langsung yang memiliki manfaat yang secara langsung dapat dirasakan oleh masyarakat.

Pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan angkatan kerja (yang terjadi beberapa tahun kemudian setelah pertumbuhan penduduk) secara tradisional dianggap sebagai salah satu faktor positif yang memacu pertumbuhan ekonomi. Jumlah tenaga kerja yang lebih besar berarti akan menambah jumlah tenaga produktif. Namun, penawaran angkatan kerja di negara-negara berkembang belum diimbangi dengan jumlah lapangan kerja sehingga kelebihan tenaga kerja belum tentu memberikan dampak yang positif terhadap pembangunan ekonominya.

Tenaga kerja yang terampil merupakan potensi sumber daya manusia yang sangat dibutuhkan dalam proses pembangunan menyongsong era globalisasi. Todaro (2003) investasi dalam pembinaan sumber daya manusia juga dapat meningkatkan kualitas modal manusia, sehingga pada akhirnya akan membawa dampak positif yang sama terhadap angka produksi,

bahkan akan lebih besar lagi mengingat terus bertambahnya jumlah manusia. Hal tersebut sesuai dengan teori *human capital*, yaitu bahwa pendidikan memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi karena pendidikan berperan di dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Sejak tahun 1999, *United Nations Development Program* (UNDP) mengenalkan konsep pengukuran mutu modal manusia yang diberi nama Human Development Indeks atau disebut IPM (Indeks Pembangunan Manusia). Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan dan kehidupan yang layak. Dalam mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah yang dikombinasikan. Dan untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli (*Purchasing Power Parity*). IPM Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2007-2012 masih berada dalam tahap menengah antara 50-79,9.

### Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang tersebut diatas, permasalahannya adalah pertumbuhan ekonomi di 35 kabupaten /kota Provinsi Jawa Tengah belum optimal dalam menurunkan angka kemiskinan. Selain itu, realisasi belanja modal yang memiliki porsi lebih sedikit, masalah ketenagakerjaan serta mutu modal manusia (IPM) yang belum maksimal menjadi penyebab rendahnya pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah.

### Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : (1) Menganalisis pengaruh belanja modal pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. (2) Menganalisis pengaruh tenaga kerja terserap terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. (3) Menganalisis pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. (4) Menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. (5) Menganalisis pengaruh Indeks Pemi

kemiskinan di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dalam memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dalam penentuan perencanaan dan kebijakan pembangunan sehingga pertumbuhan ekonomi dapat mencapai hasil yang optimal dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

### Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Kuznets dalam Todaro (2003) mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Todaro (2003) menyampaikan ada tiga komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi dari setiap negara. *Pertama*, akumulasi modal, yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik dan modal manusia atau sumberdaya manusia. *Kedua*, pertumbuhan penduduk yang selanjutnya akan menambah jumlah angkatan kerja. *Ketiga*, kemajuan teknologi yaitu berupa cara-cara baru atau perbaikan atas cara-cara lama dalam menangani suatu pekerjaan. suatu pekerjaan.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk melihat kinerja perekonomian, baik di tingkat nasional maupun regional (daerah). Pada dasarnya, pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan output agregat (keseluruhan barang dan jasa yang dihasilkan oleh kegiatan perekonomian) atau Produk Domestik Bruto (PDB). PDB sendiri merupakan nilai total seluruh output akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian, baik yang dilakukan oleh warga lokal maupun warga asing yang bermukim di negara bersangkutan. Sehingga, ukuran umum yang sering digunakan untuk melihat laju pertumbuhan ekonomi adalah persentase perubahan PDB untuk skala nasional atau persentase perubahan PDRB untuk skala provinsi atau kabupaten/kota.

Teori pertumbuhan ekonomi Neo Klasik berkembang sejak tahun 1950-an. Todaro (2003)

model pertumbuhan Neo Klasik Solow ini merupakan pengembangan dari formulasi Harrod Domar dengan menambahkan faktor kedua yakni tenaga kerja serta memperkenalkan variabel independen ketiga yakni teknologi ke dalam persamaan pertumbuhan. Dalam bentuknya yang lebih formal model pertumbuhan neo klasik Solow memakai fungsi produksi agregat standar yakni :  $Y = A^{\mu} K^{\alpha} L^{1-\alpha}$ . Y adalah produk domestik bruto, K adalah stok modal fisik dan modal manusia, L adalah tenaga kerja non terampil, A adalah konstanta yang merefleksikan tingkat teknologi dasar, sedangkan  $\mu$  melambangkan konstanta tingkat kemajuan teknologi. Adapun simbol  $\alpha$  melambangkan elastisitas output terhadap modal (atau kenaikan GDP yang bersumber dari 1 persen penambahan modal fisik atau modal manusia).

Selain itu, teori pertumbuhan endogen menganalisis pertumbuhan yang bersifat endogen, Pertumbuhan ekonomi merupakan hasil dari dalam sistem ekonomi. Teori ini menganggap bahwa pertumbuhan ekonomi lebih ditentukan oleh sistem produksi, bukan berasal dari luar sistem. Kemajuan teknologi merupakan hal yang endogen, Pertumbuhan merupakan bagian dari keputusan pelaku-pelaku ekonomi untuk berinvestasi dalam pengetahuan. Model awal dari *endogenous growth* oleh Romer (1983,1986) menyatakan bahwa *long-run growth* pada umumnya ditentukan oleh akumulasi pengetahuan. Walaupun ada penambahan ilmu pengetahuan baru menunjukkan *diminishing returns* pada suatu perusahaan, namun penciptaan ilmu pengetahuan pada suatu perusahaan diasumsikan mempunyai dampak positif secara eksternal pada teknologi produksi perusahaan lain.

### Kemiskinan

Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan adalah ketidakmampuan penduduk memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan pangan maupun non pangan. Maksud dari definisi tersebut adalah membandingkan tingkat konsumsi penduduk dengan garis kemiskinan (GK) atau jumlah rupiah untuk konsumsi orang perbulan.

BPS menghitung angka kemiskinan lewat dua pendekatan, yaitu

dasar dan 2 pendekatan *Head Account Index*. Pendekatan yang pertama merupakan pendekatan yang sering digunakan dan mengartikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, sementara *Head Account Index* merupakan ukuran yang menggunakan kemiskinan absolut. Sementara jumlah penduduk miskin adalah jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan yang merupakan nilai rupiah dari kebutuhan minimum makanan dan non makanan, yaitu tidak hanya terbatas pada sandang dan papan melainkan juga termasuk pendidikan dan kesehatan. Dari sisi kebutuhan minimum makanan, BPS tidak menyetarakan kebutuhan dasar dengan jumlah beras tetapi dengan menggunakan indikator yang direkomendasikan oleh Widyakarya Pangan dan Gizi tahun 1998 yaitu 2.100 kalori per orang per hari. BPS pertama kali melaporkan penghitungan jumlah dan persentase penduduk miskin pada tahun 1984. Pada saat itu, penghitungan jumlah dan persentase penduduk miskin mencakup periode 1976-1981 dengan menggunakan modul konsumsi Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional). Sejak tahun 1981, setiap 3 tahun sekali, dengan data modul konsumsi Susenas, BPS secara rutin mengeluarkan data jumlah dan persentase penduduk miskin hanya disajikan untuk tingkat nasional yang dipisahkan menurut perkotaan dan pedesaan. Selanjutnya, sejak tahun 1993, informasi mengenai jumlah dan persentase penduduk miskin disajikan untuk seluruh provinsi.

### Pengeluaran Pemerintah

Menurut Keynes tingkat kegiatan dalam perekonomian ditentukan oleh pengeluaran agregat. Jika pengeluaran pemerintah meningkat maka permintaan agregat (AD) akan meningkat. Selain itu, peranan pengeluaran pemerintah (G) di negara berkembang sangat signifikan mengingat kemampuan sektor swasta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masih sangat terbatas, oleh karena itu peranan pemerintah sangatlah penting. Peningkatan permintaan agregat (AD) berarti terjadi pertumbuhan ekonomi, karena pertumbuhan ekonomi diukur dari PDB maka peningkatan pertumbuhan berarti peningkatan pendapatan (Mankiw, 2006).

Mankiw (2006) mengemukakan bahwa salah satu komponen PDB adalah pengeluaran pemerintah/ belanja pemerintah mencakup pembelanjaan barang dan jasa oleh pemerintah daerah, negara bagian dan pusat (federal). Belanja pemerintah mencakup upah pekerja pemerintah dan pembelanjaan untuk kepentingan umum. Namun, upah pekerja pemerintah ini dinamakan dengan pembayaran transfer karena tidak dibelanjakan untuk mendapatkan barang dan jasa yang diproduksi. Pendapatan transfer mempengaruhi pendapatan rumah tangga, namun tidak mencerminkan produksi perekonomian tersebut. Dari sudut pandang ilmu ekonomi makro, pembayaran transfer berlaku seperti pajak yang negatif. Karena PDB dimaksudkan untuk mengukur pendapatan dari produksi barang dan jasa serta pengeluaran atas produksi barang dan jasa, pembayaran transfer tidak dihitung sebagai bagian dari belanja pemerintah.

Jenis belanja pemerintah dalam anggaran pendapatan dan belanja baik negara maupun daerah (provinsi/kabupaten/kota), pengeluaran dibedakan menjadi :

- Belanja operasi. Rincian belanja operasi antara lain digunakan untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa, pemeliharaan, perjalanan dinas, pinjaman, subsidi, hibah dan belanja operasional lainnya.
- Belanja modal. Belanja modal digunakan untuk pembelian /pembentukan aset tetap seperti gedung, jalan (infrastruktur) dan aset tetap lainnya.
- Belanja tak terduga. Merupakan belanja tidak terduga yang sebelumnya tidak dianggarkan seperti penanganan bencana.

### Tenaga kerja terserap

Menurut Lewis, perekonomian dibagi menjadi duasektor yaitu : (a) sektor tradisional (pedesaan yang subsisten) yang ditandai oleh produktivitas tenaga kerja yang sangat rendah bahkan nol; (b) sektor moderen (industri perkotaan) dimana tenaga kerja dari sektor subsisten berpindah secara perlahan. Adanya proses perpindahan tenaga kerja dan pertumbuhan tingkat pengerjaan di perkotaan menyebabkan pertumbuhan output di sektor moderen tersebut. Ke-

moderen. Dengan adanya investasi yang dilakukan disektor moderen yang pendapatan rata-ratanya dianggap konstan maka akan menarik tenaga kerja dari sektor pertanian tradisional sehingga penambahan tenaga kerja tersebut akan menaikkan produk yang dihasilkan.

Menurut Todaro (2003) pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan angkatan kerja secara tradisional dianggap sebagai faktor positif yang memacu pertumbuhan ekonomi. Jumlah tenaga kerja yang besar berarti akan menambah jumlah tenaga yang produktif, sedangkan pertumbuhan penduduk yang lebih besar berarti ukuran domestiknya lebih besar. Meskipun demikian, hal tersebut masih dipertanyakan apakah berdampak positif atau negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Semuanya sepenuhnya tergantung dari kemampuan sistem perekonomian yang bersangkutan untuk menyerap dan secara produktif memanfaatkan tambahan tenaga kerja tersebut. Kemampuan tersebut dipengaruhi oleh tenaga kerja dan akumulasi modal serta tersedianya input dan faktor penunjang, seperti kecakapan manajerial dan administrasi.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) penduduk usia kerja didefinisikan sebagai penduduk yang berumur 15 tahun ke atas, dan dibedakan sebagai Angkatan Kerja dan bukan Angkatan Kerja. Pertumbuhan penduduk tiap tahun akan berpengaruh terhadap pertumbuhan angkatan kerja. Untuk melihat peranannya dalam pertumbuhan ekonomi, maka dibutuhkan tenaga kerja yang produktif yang mampu menghasilkan barang dan jasa.

### Indeks Pembangunan Manusia

Menurut *United Nations Development Programme* (UNDP), dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terdapat tiga indikator komposit yang digunakan untuk mengukur pencapaian rata-rata suatu negara dalam pembangunan manusia, yaitu: lama hidup, yang diukur dengan angka harapan hidup ketika lahir; pendidikan yang diukur berdasarkan rata-rata lama bersekolah dan angka melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas; standar hidup yang diukur dengan pengeluaran perkapita yang telah disesuaikan menjadi paritas daya beli. Nilai indeks ini berkisar antara 0-100.

Menurut Mankiw (2003) modal manusia adalah pengetahuan dan kemampuan yang diperoleh oleh para pekerja melalui pendidikan mulai dari program untuk anak-anak sampai dengan pelatihan dalam pekerjaan (*on the job training*) untuk para pekerja dewasa. Seperti halnya dengan modal fisik, modal manusia meningkatkan kemampuan untuk memproduksi barang dan jasa. Untuk meningkatkan level modal manusia dibutuhkan investasi dalam bentuk guru, perpustakaan dan waktu belajar.

### Hipotesis

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, kajian teori, dan penelitian sebelumnya maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut : (1) Belanja modal pemerintah daerah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten /kota di Provinsi Jawa Tengah. (2) Tenaga kerja terserap berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten /kota di Provinsi Jawa Tengah. (3) Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten /kota di Provinsi Jawa Tengah. (4) Pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di kabupaten /kota di Provinsi Jawa Tengah. (5) Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di kabupaten /kota di Provinsi Jawa Tengah.

### METODE PENELITIAN

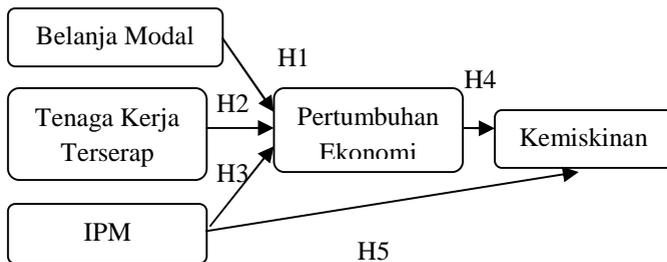
Penelitian ini menggunakan data sekunder berbentuk *time series* dari tahun 2003 sampai dengan 2012 dan data *cross section* yang terdiri atas 35 kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Tengah sehingga merupakan *pooled data* yaitu gabungan antara data *time series* (tahun 2003-2012 : 10 tahun) dengan data *cross section* 35 kabupaten / kota. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan yang berupa referensi statistik, terbitan berkala, buku, serta dokumen.

### Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional atas variabel penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pertumbuhan Ekonomi yaitu hasil bagi dari selisih antara PDRB pada tahun tertentu dengan PDRB pada

PDRB pada tahun sebelumnya dalam satuan persen (Badan Pusat Statistik, 2012). Dalam hal ini PDRB yang digunakan adalah PDRB atas dasar harga konstan 2000. Pertumbuhan ekonomi diukur dengan rumus sebagai berikut:



$$GR = \frac{(PDRB_t - PDRB_{t-1})}{PDRB_{t-1}}$$

Keterangan :

GR = Pertumbuhan Ekonomi

PDRB<sub>t</sub> = PDRB pada tahun t

PDRB<sub>t-1</sub> = PDRB pada tahun sebelumnya

2. Kemiskinan yaitu persentase jumlah penduduk miskin yang dinyatakan dalam persen (%)
3. Belanja Pemerintah Daerah yaitu berupa belanja langsung yang didalamnya terdapat belanja modal yang merupakan belanja yang hasilnya dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat. Belanja ini tercantum dalam APBD Provinsi Jawa Tengah dan dinyatakan dalam satuan rupiah.
4. Human Development Indeks atau Indeks Pembangunan Manusia yang diukur dengan perbandingan dari angka harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia. Nilai indeks ini berkisar antara 0-100.
5. Tenaga kerja terserap (L) yaitu penduduk berusia 15 tahun keatas yang termasuk angkatan kerja yang bekerja pada semua sektor lapangan usaha dan dinyatakan dalam satuan orang.

**Teknik Analisis**

Untuk memenuhi tujuan dalam penelitian ini serta menguji hipotesis yang telah ditetapkan maka dilakukan analisis jalur (path analysis).

Ghozali (2005) analisis jalur merupakan pengembangan dari model regresi yang digunakan untuk menguji kesesuaian (fit) dari matrik korelasi dari dua atau lebih model yang dibandingkan oleh si peneliti. Model biasanya digambarkan dengan lingkaran dan anak panah yang menunjukkan hubungan kausalitas. Path analysis atau analisis jalur adalah analisis model kausal dari variabel independent (eksogen), variabel antara (endogen), dan variabel dependen serta semua variabel terukur.

Berdasarkan studi teoritik dan empirik sebelumnya, kerangka konseptual dalam penelitian ini secara lengkap digambarkan sebagai berikut :

Dalam penelitian ini pertumbuhan ekonomi Propinsi Jawa Tengah sebagai (Y); stok modal fisik dan modal manusia dilihat melalui : (1) realisasi belanja modal pemerintah daerah (BM), (2) Human Development Indeks atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan (3) tenaga kerja terserap dilihat dengan jumlah angkatan kerja yang bekerja (L) sedangkan untuk kemiskinan diwakili dengan P, sehingga diperoleh persamaan :

$$Y_{it} = \alpha_0 + \alpha_1 BM_{it} + \alpha_2 IPM_{it} + \alpha_3 L_{it} + \epsilon_{it}$$

$$P_{it} = \beta_0 + \beta_1 Y_{it} + \beta_2 IPM_{it} + \epsilon_{it}$$

**HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

**Normalitas**

Pengujian normalitas *multivariate* dilakukan dengan melihat nilai CR *multivariate* yang dapat dilihat pada baris paling bawah dari Tabel 1. Karena nilai CR *multivariate* lebih kecil dari ±2,58, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini berdistribusi normal. Dengan demikian dalam pengujian data untuk permodelan SEM yang dilakukan dengan uji normalitas tunggal maupun normalitas *multivariate*, tidak ada bukti bahwa data yang digunakan tidak terdistribusi tidak normal, oleh karena itu asumsi normalitas telah terpenuhi dan data yang digunakan dalam penelitian ini layak untuk digunakan dalam estimasi selanjutnya. Hasil dari analisis seperti tersaji di dalam Tabel 1 berikut ini.

**Tabel 1. Hasil Uji Normalitas Data**

Variable	min	max	skew	c.r.	kurtosis	c.r.
IPM	61.300	78.600	-.150	-1.116	.164	.612
TENAGA	48557.000	849566.000	-.447	-3.329	.004	.014
BljModal	22130.720	297197.000	.764	5.693	.347	1.291
LAJU	1.180	6.600	-.578	-4.309	.299	1.114
Miskin	4.220	34.430	.196	1.460	-.614	-2.285
Multivariate					1.317	1.436

### Multikolinearitas

Multikolinearitas digunakan untuk melihat apakah pada data penelitian terdapat multikolinearitas (*multicollinearity*) dalam kombinasi-kombinasi variabel, maka yang perlu diamati adalah determinan dari matriks kovarians sampelnya. Adanya *multikolinearitas* atau *singularitas* dapat diketahui melalui nilai determinan matriks kovarians yang benar-benar kecil, atau mendekati nol (Tabachnick & Fidell, 1998 dalam Ghozali, 2011). Berdasarkan hasil pengolahan data pada penelitian ini, nilai determinan matriks kovarians sampel sebagai berikut :

$$\text{Determinant of sample covariance matrix} = 8.50 \times 10^2$$

Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai determinan matriks kovarians sampel adalah jauh dari nol. Sehingga dapat dikatakan bahwa data penelitian yang digunakan tidak terdapat *multikolinearitas* dan *singularitas*. Terlepasnya data dari penyimpangan *multikolinearitas* dan *singularitas* menunjukkan bahwa data layak digunakan untuk penelitian.

### Evaluasi Menilai Model Fit

Goodness of Fit mengukur kesesuaian input observasi atau sesungguhnya (matrik kovarian atau korelasi) dengan prediksi dari model yang diajukan (*proposed model*). Ada tiga jenis ukuran goodness of fit yaitu (1) *absolute fit measure*, (2) *incremental fit measures* dan (3) *parsimonious fit measures*. Absolute fit measures mengukur model fit secara keseluruhan (baik model struktural maupun model pengukuran secara bersama-sama), sedangkan incremental fit measures ukuran untuk membandingkan proposed model dengan model lain yang dispesifikasi oleh peneliti dan parsimonious fit measures melakukan adjustment terhadap pengukuran fit untuk dapat diperbandingkan antar model dengan jumlah koefisien yang berbeda. Pada penelitian ini menggunakan jenis pengukuran *absolute fit measure* dan *incremental fit measures*.

Perhitungan dengan program AMOS 20 untuk model SEM dalam penelitian ini, dihasilkan indeks-indeks goodness of fit sebagai berikut :

Tabel 2. Evaluasi Kriteria Goodness of Fit Indeks

Goodness of Fit Index	Cut off Value	Hasil Model	Keterangan
Chi Square	diharapkan kecil	7,9	baik
Probability	0,05	0,19	marginal
CMIN/DF	5	3,9	baik
GFI	0-1,0	0,99	baik
RMSEA	0,05-0,08	0,95	marginal
AGFI	0,90	0,93	baik
TLI	0,90	0,93	baik
NFI	0,90	0,98	baik

Berdasarkan Tabel 2 dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan model dapat diterima dan dapat menganalisis parameter estimate untuk langkah selanjutnya. Pada penelitian ini meskipun hasil dari nilai probability termasuk marginal dengan nilai 0.19 namun hasil dari CMIN/DF yaitu chi-square dibagi dengan degree of freedom sebesar 3.9 yang menurut Wheaton et Al (1977) (Ghozali :2005) nilai ratio 5 (lima) atau kurang dari lima merupakan ukuran yang reasonable atau dapat diterima. Peneliti lainnya seperti Byrne (1988) mengusulkan nilai ratio ini < 2 merupakan ukuran fit.

### Pengujian Hipotesis

H1: Ada pengaruh positif Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Hipotesis pertama menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil uji terhadap parameter estimasi (*standardized regression weight*) antara belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi menunjukkan adanya hubungan positif sebesar 0,188. Nilai *critical ratio* (CR) sebesar 3,469, nilai CR tersebut diatas nilai kritis  $\pm 1,96$  atau dengan melihat nilai p-value berada dibawah nilai signifikansi 0,05 yaitu ditunjukkan dengan tanda (\*\*\*) . Dengan demikian hipotesis pertama menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi dapat diterima karena signifikan.

**H2: Ada pengaruh positif Tenaga Kerja Terserap terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

Hipotesis kedua menyatakan bahwa tenaga kerja terserap berpengaruh positif terhadap

pertumbuhan ekonomi. Hasil uji terhadap parameter estimasi (*standardized regression weight*) antara tenaga kerja terserap terhadap pertumbuhan ekonomi menunjukkan adanya hubungan positif sebesar 0,159. Nilai *critical ratio* (CR) sebesar 2,739, nilai CR tersebut diatas nilai kritis  $\pm 1,96$  atau dengan melihat nilai p-value berada dibawah nilai signifikansi 0,05 yaitu sebesar 0,006. Dengan demikian hipotesis kedua menunjukkan bahwa tenaga kerja terserap berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi dapat diterima karena signifikan.

**H3: Ada pengaruh positif Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

Hipotesis ketiga menyatakan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil uji terhadap parameter estimasi (*standardized regression weight*) antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap pertumbuhan ekonomi menunjukkan adanya hubungan positif sebesar 0,453. Nilai *critical ratio* (CR) sebesar 8,199, nilai CR tersebut diatas nilai kritis  $\pm 1,96$  atau dengan melihat nilai p-value berada dibawah nilai signifikansi 0,05 yaitu ditunjukkan dengan tanda (\*\*\*) . Dengan demikian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi dapat diterima karena signifikan.

**H4 : Ada pengaruh negatif Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan**

Hipotesis keempat menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan terhadap parameter

*regression weight*) antara pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan tidak menunjukkan adanya hubungan negatif. Nilai *critical ratio* (CR) sebesar 0,577, nilai CR tersebut dibawah nilai kritis +1,96 atau dengan melihat nilai p-value berada diatas nilai signifikansi 0,05 yaitu sebesar 0,544. Dengan demikian hipotesis keempat menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap kemiskinan tidak dapat diterima karena tidak signifikan.

**H5: Ada pengaruh negatif Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

Hipotesis kelima menyatakan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil uji terhadap parameter estimasi (*standardized regression weight*) antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap pertumbuhan ekonomi menunjukkan adanya hubungan negatif sebesar -0,694. Dengan nilai p-value berada dibawah nilai signifikansi 0,05 yaitu ditunjukkan dengan tanda (\*\*\*). Dengan demikian hipotesis kelima menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dapat diterima karena signifikan.

**Tabel 3. Pengujian Hipotesis**

		Estimate	S.E.	C.R.	P	Label
LAJU <---	BljModal	.000	.000	3.469	***	
LAJU <---	TENAGA	.000	.000	2.735	.006	
LAJU <---	IPM	.144	.018	8.199	***	
Miskin <---	LAJU	.178	.308	.577	.564	
Miskin <---	IPM	-1.533	.098	-15.686	***	

Sumber : Data sekunder diolah,2014 (Output AMOS 20)

**Tabel 4. Output Standardized Regression Weight**

	Estimate
LAJU <---	BljModal .188
LAJU <---	TENAGA .159
LAJU <---	IPM .453
Miskin <---	LAJU .026
Miskin <---	IPM -.694

Sumber : Data sekunder diolah,2014 (Output AMOS 20)

## PENUTUP

### Simpulan

Berdasarkan analisis hasil penelitian dan pembahasan tentang pengaruh belanja modal pemerintah daerah, tenaga kerja terserap, dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan (studi kasus 35 kabupaten / kota di Provinsi Jawa Tengah) , dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Belanja modal pemerintah daerah berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah.

2. Tenaga kerja terserap berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah.
3. Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah.
4. Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah.
5. Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan yang negatif terhadap kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah.

### Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dihasilkan dalam penelitian ini, maka disampaikan beberapa saran yang diharapkan berguna bagi pemerintah daerah dan masyarakat serta untuk penelitian yang akan datang, yaitu sebagai berikut :

1. Dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi tingkat kemiskinan, maka pemerintah daerah hendaknya lebih bijak dalam menganggarkan anggaran belanja modal dalam APBD nya karena besarnya anggaran tersebut dapat secara langsung mempengaruhi peningkatan pertumbuhan ekonomi dan secara tidak langsung mengurangi tingkat kemiskinan.

### DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik.2013.*Statistik Keuangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013*.Semarang :BPS dan BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah.

-----2009. *Statistik Keuangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009*.Semarang :BPS dan BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah.

-----2005. *Statistik Keuangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005*.Semarang :BPS dan BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah.

-----2013.*Produk Domestik Regional Jawa Tengah 2013*.Semarang : BPS Provinsi Jawa Tengah.

-----2009.*Produk Domestik Regional Jawa Tengah 2009*.Semarang : BPS Provinsi Jawa Tengah.

-----2005.*Produk Domestik Regional Jawa Tengah 2005*.Semarang : BPS Provinsi Jawa Tengah.

-----2013.*Jawa Tengah Dalam Angka 2013*.Semarang : BPS Provinsi Jawa Tengah.

2. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat belum tentu dapat mengurangi kemiskinan dikarenakan pertumbuhan ekonomi tidak tersebar secara merata disetiap daerah sehingga diperlukan adanya daya saing daerah agar setiap daerah dapat meningkatkan pendapatan perkapitanya yang kemudian dapat mengurangi tingkat kemiskinan.
3. Selain meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerintah daerah diharapkan lebih memberikan perhatian pada pembangunan manusia (*human development*) untuk mengurangi tingkat kemiskinan.
4. Banyaknya ketersediaan tenaga kerja harus dibarengi dengan kemampuan yang memadai baik secara akademis maupun keterampilan karena untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi diperlukan kemampuan untuk menguasai teknologi.

-----2009.*Jawa Tengah Dalam Angka 2009*.Semarang : BPS Provinsi Jawa Tengah.

-----2005.*Jawa Tengah Dalam Angka 2005*.Semarang : BPS Provinsi Jawa Tengah.

Ghozali,Imam.2008.*Model Persamaan Struktural*.Semarang: Badan Penerbit UNDIP.

Hendarmin.2012.*Pengaruh Belanja Modal Pemerintah Daerah dan Investasi Swasta terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kesempatan Kerja, dan Kesejahteraan masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat*.Jurnal Ekonomi Sosial Vol 8 No.1693-9093.

Koswara,E.2001.*Otonomi Daerah:Untuk Demokrasi dan Kemandirian Masyarakat*.Jakarta: Yayasan Pariba.

Kuncoro,Mudrajad.2003.*Ekonomi Pembangunan*.Yogyakarta: YKPN.

Mailendra, Fitra. 2009. "Analisis Dampak Pemekaran Wilayah dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembangunan Manusia di Propinsi Jawa Barat". Skripsi. Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor.

- Mardiasmo, 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Sasana, Hadi. 2009. *Analisis Dampak Pertumbuhan Ekonomi, Kesenjangan antar Daerah, dan Tenaga Kerja Terserap Terhadap Kesejahteraan di Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Tengah dalam Era Desentralisasi*. Jurnal Bisnis dan Ekonomi Vol 16 No. 1412-3126. Semarang: FE UNDIP.
- Sukirno, Sadono. 2000. *Makroekonomi Modern Perkembangan Pemikiran dari Keynesian Baru*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada Cetakan Pertama.
- Suparmoko. 1997. *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek*. BPFE, Yogyakarta: BPFE.
- Suryadi, Ace & H.A.R Tilaar. 1994. *Analisis Kebijakan Pendidikan, Suatu Pengantar*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Todaro, Michael P, 1997. *Pembangunan Ekonomi*. Jakarta : Erlangga.
- Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang No.33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintah Daerah
- Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.